

URUN REMBUG PENYELESAIAN KONFLIK MELALUI *FOCUS GROUP DISCUSSION* DENGAN BRIGADE MOBILE POLRI

Syarif Ali¹, Agus Kusmana²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

EmAIL: syarif.ali@upnvj.ac.id, aguskusmana.upnvj.ac.id

Abstrak

Konflik dalam berbagai dimensi merupakan bagian dari dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, namun penyelesaian konflik secara damai, berkeadilan, dan berkepastian hukum serta menghormati Hak Asasi Manusia (HAM), merupakan sasaran yang ingin dicapai secara bersama. Korps Brimob POLRI selaku pengemban tanggung jawab keamanan dalam negeri, berupaya menemukan solusi terbaik penyelesaian konflik di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk memanfaatkan hasil penelitian, pemikiran dan analisis akademisi. Karena itu kegiatan dengan mengundang akademisi dalam forum, merupakan salah satu strategi Korps Brimob POLRI untuk mendapatkan data dan informasi yang selama ini belum tersosialisasikan oleh akademisi. Di sisi lain, bagi akademisi, kegiatan tukar menukar ide dan pemikiran menjadi ajang Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan mitra utama Korps Brimob POLRI. Metode yang digunakan dalam kegiatan PKM ini yakni Fokus Group Discussion (FGD) yang diikuti oleh akademi UPN Veteran Jakarta, berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Korps Brimob POLRI. Hasil PKM memberikan saran kepada Korps Brimob POLRI agar bekerjasama dengan pers, menampilkan sosok POLRI yang ramah dan pro-masyarakat, dan membentuk buzzer untuk mengedukasi masyarakat dan mensosialisasikan kebijakan Korps Brimob POLRI dalam upaya meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan dampak negatif konflik.

Kata kunci: Akademi, Brimob POLRI, konflik, PKM

Abstract

Conflict in various dimensions is part of the dynamics of national and state life, but resolving conflicts peacefully, fairly and with legal certainty and respecting Human Rights (HAM) is a target that we want to achieve together. The Indonesian Police Mobile Brigade Corps, as the bearer of responsibility for domestic security, seeks to find the best solution to resolve conflicts in various regions in Indonesia, including utilizing the results of research, thought and analysis from academics. Therefore, the activity of inviting academics to the forum is one of the strategies of the Indonesian Police Mobile Brigade Corps to obtain data and information that has so far not been disseminated by academics. On the other hand, for academics, the exchange of ideas and thoughts is an event for Community Service (PKM) with the main partner of the Indonesian Police Mobile Brigade Corps. The method used in this PKM activity is Focus Group Discussion (FGD) which is attended by

PN Veteran Jakarta academy, comes from the Faculty of Economics and Business, Faculty of Social and Political Sciences, Faculty of Law, Faculty of Public Health and the Indonesian Police Mobile Brigade Corps. The results of the PKM provide advice to the POLRI Mobile Brigade Corps to collaborate with the press, present a friendly and pro-community POLRI figure, and form a buzzer to educate the public and socialize the policies of the POLRI Mobile Brigade Corps in an effort to increase awareness and awareness of the negative impacts of conflict.

Keywords: Academy, Brimob POLRI, conflict, PKM

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Indonesia menjadi destinasi orang Eropa datang ke Indonesia sejak ratusan tahun yang lalu. Kemasyhuran Indonesia dikenal dengan hasil bumi yang luar biasa. Salah seorang tokoh bangsa, Haji Agus Salim, menerapkan diplomasi rokok kretek untuk menarik perhatian Pangeran Philip atas kehadiran Agus Salim dan Sri Paku Alam IX yang diutus pemerintah Republik Indonesia menghadiri penobatan isteri Pangeran Philip, Ratu Elizabeth, yang naik tahta menggantikan ayahnya (Raja George VI) yang mangkat pada 4 Juni 1953.

Diplomat Indonesia ini sengaja merokok kretek yang mengeluarkan asap dengan bau khas campuran bererapa rempah-rempah seperti menyan dan cengkeh. Pangeran Philip hanya memperhatikan tamu dari kalangan bangsawan Eropa yang berpenampilan mewah dan terhormat. Tindakan Pangeran Inggris ini membuat Haji Agus Salim mengisap dan melambaikan rokok kretek terbuat dari tembakau dan cengkeh asli Indonesia. Haji Agus Salim menanyakan kepada suami Ratu Elizabeth apakah Pangeran Inggris mengenalnya bau asap rokok tersebut. Karena Pangeran tidak mengenalnya, Agus Salim menjelaskan bahwa rokok itu terbuat dari rempah-rempah, hasil bumi nusantara yang mendorong bangsa Eropa berlomba datang ke Indonesia.

Pendudukan oleh bangsa Eropa menimbulkan konflik tidak saja antara kerajaan Nusantara melawan Belanda, tapi benih konflik juga terjadi antara Belanda dengan Portugis. Ketidak harmonisan antar penjajah menurut (Rahdan, 2021) ekspedisi VOC mendapatkan perlawanan dari Portugis yang berada di sana di pulau penghasil rempah-rempah. Konflik antara sekutu, ABDACOM, dengan Jepang juga terjadi karena sekutu ingin mempertahankan wilayah Malaya dan Hindia Belanda (Oktorino, 2013). Konflik tidak hanya terjadi sebelum kemerdekaan, tapi setelah kemerdekaan. Bahkan konflik pasca kemerdekaan mengarah pada disintegrasi bangsa

(Kaka, 2021) menyebutkan kondisi Indonesia secara nyata harus diakui oleh berbagai pihak bila ditinjau dari kondisi geografis, demografi serta kondisi sosial pasti terlihat secara jelas bahwa pluralitas, suku, agama, ras, dan antar golongan dijadikan penyebab konflik dan kekerasan masal. Dalam tataran organisasi, konflik tidak dapat dihindari bahkan konflik

diperlukan untuk memperbaiki kinerja organisasi. Sebagai organisasi, Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki luas wilayah, sebesar 1.904.569 km², 17.504 pulau, memiliki lebih dari 270 juta penduduk. Agama yang diakui oleh negara terdiri dari Islam, Kristen, Budha, Hindu, Kong Hu Cu dan tercatat juga adanya aliran kepercayaan. Indonesia adalah negara multiras, multietnis, dan multi kultural. Perbedaan persepsi, kepentingan, dan pandangan hidup cenderung menciptakan konflik. (Syahid, 2018) mengungkapkan jika ada perbedaan di situ ada konflik, hanya saja perbedaan terletak pada tensi konfliknya, skala besar atau kecil. Pada dasarnya, konflik terjadi dalam satu peristiwa terdapat dua atau lebih pendapat atau tindakan yang dipertimbangkan (Sudarmanto, 2021). Dapat dikatakan sejarah konflik di Nusantara jauh sebelum Indonesia terbentuk. (Umar, 2013) menyebutkan sembilan jenis konflik seperti disajikan dalam tabel 1.

Tablel 1
Jenis Konflik di Jakarta

No	Jenis Konflik
1	Konflik Agama
2	Konflik Politik
3	Konflik TNI-POLRI
4	Konflik Ekonomi
5	Konflik Buruh-Majikan
6	Konflik Sumber Daya Alam
7	Konflik Warga
8	Konflik Pelajar – Mahasiswa
9	Konflik etnik

Sumber: Musniumar, (2013)

Tabel 1 menunjukkan sembilan jenis konflik yang sering terjadi di Jakarta atau juga terjadi di wilayah lain dan setiap konflik memiliki dampak. (Harahap, 2018) mengutip Coser yang mengemukakan bahwa dampak yang ditimbulkan oleh konflik terganggunya hubungan sosial, merusak tujuan bersama, menimbulkan kebencian dan kebingungan, mengurangi

kepercayaan, dan serta membangkitkan emosi. Karena itu konflik dalam masyarakat perlu diatasi oleh Aparatur Negara, salah instansi yang terpanggil untuk membantu menyelesaikan konflik yakni Korp Brigade Mobile POLRI (Korp Brimob POLRI).

Upaya POLRI dalam penanganan konflik, menurut (Suparmin, 2014) sudah menerapkan 3 (tiga) strategi yakni: (1). Kerangka strategi dalam upaya pencegahan konflik, (2). Kerangka regulasi bagi penanganan pada saat konflik terjadi meliputi penghentian konflik kekerasan, dan pencegahan jatuhnya korban jiwa dan harta benda, dan (3) Kerangka regulasi bagi penanganan pasca konflik, yang berkaitan dengan tugas penyelesaian sengketa, proses hukum, serta kegiatan pemulihan, reintegrasi, rehabilitasi, pemulihan keamanan.

Namun upaya tersebut belum memberikan hasil optimal, (Siregar, 2008) mengungkapkan bahwa upaya untuk mewujudkan kinerja POLRI belum menunjukkan hasil optimal disebabkan beberapa keterbatasan. Keterbatasan tersebut berasal dari dalam tubuh POLRI namun juga berasal dari eksternal berupa peraturan pemerintah yang bersifat normatif.

Keterbatasan dalam tubuh POLRI dapat disebabkan strategi yang digunakan tidak tepat. Oleh karena itu, Staf Ahli Komandan Korps Brimob POLRI mengadakan forum untuk memperoleh hasil analisis/kajian perpustakaan/observasi dari persepektif Akademisi. Untuk itu, pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022, dilakukan penyampaian opini yang dilakukan secara virtual. Akademisi dari UPN Veteran Jakarta yang berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat menjadi pembicara. Selanjutnya Brimob POLRI menjadikan acaranya ini sebagai kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat. Tujuan utama PKM ini yakni Korps Brimob POLRI mendapatkan umpan balik yang selanjutnya akan dijadikan alternatif strategi penyelesaian konflik secara damai.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan secara daring dengan melalui beberapa tahap. Tahap pertama, unit Brimob POLRI mengirimkan undangan kepada manajemen UPN Veteran Jakarta melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UPN Veteran Jakarta. Tahap kedua, LPPM yang merupakan salah satu unit struktural

UPN Veteran Jakarta menyebarkan undangan melalui WA Grup. Setelah melakukan pendaftaran, maka terjalinlah komunikasi kemitraan antara akademisi UPN Veteran Jakarta dengan unit Brimob POLRI. Tahap ketiga pelaksanaan kegiatan PKM pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022.

Model Pengabdian Kepada Masyarakat antara Tim UPN Veteran Jakarta dengan mitra Brimob POLRI berupa *Focus Group Discussion* (FGD). Kegiatan pertama dihadiri oleh 20 peserta FGD terdiri dari 8 (delapan) dari Brimob POLRI dan 12 Akademisi UPN Veteran Jakarta.

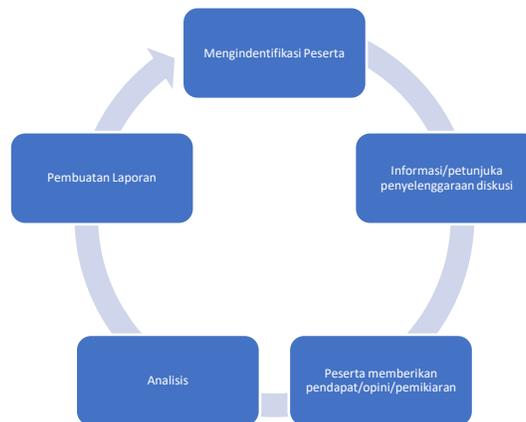
Dalam FGD yang dipandu oleh Staf Ahli Komandan Brimob POLRI, setiap peserta diberikan waktu untuk menyampaikan pemikiran dan saran berkenaan dengan pengalaman dan pemikiran yang dapat diterapkan oleh Brimob POLRI untuk meminimalisir konflik di seluruh wilayah Indonesia. Berikut agenda yang dilaksanakan oleh tim PKM UPN Veteran Jakarta dengan Korps Brigade Mobil POLRI sebagai mitra.

Tabel 2

Agenda PKM dengan Mitra Brimob POLRI

No	Hari/Tanggal	Agenda	Media
1	Senin/21 Februari 2022	Pembukaan dari mitra Brimob POLRI	Zoom
		Penyampaian pendapat dari Akademisi	
		Tanya Jawab	
		Kesimpulan	

Focus Group Discussion yang diikuti oleh akademisi UPN Veteran Jakarta, hanya sampai pada tahap ke 3 (tiga) yakni *Stakeholder voice* dari 5 (lima) tahap FGD. Sedangkan Analyse dan pelaporan dilakukan oleh pihak POLRI. Tahap FGD antar akademi UPN Veteran Jakarta dengan POLRI digambarkan pada gambar 1, di bawah ini:



Gambar 1. Metode Pelaksanaan FGD Akademi UPNVJ - POLRI

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanyaan kunci yang diajukan dalam kegiatan FGD ini yakni: Bagaimana mengatasi konflik yang terjadi di Jakarta dari persepektif akademisi? Dalam kesempatan ini, penulis memberikan saran, sebagai berikut:

a. Bekerjasama dengan media pers

Setiap kali terjadi gejolak yang bersifat komunal, peran media pers sangat besar dalam memperbesar atau memperkecil gejolak yang memicu konflik. Karena itu, Brimob Polri bekerja sama dengan menjadikan pers sebagai mitra. Dalam tataran ini, media pers dapat membantu POLRI dengan memberitakan konflik, pertentangan, kekerasan dengan berdasarkan fakta yang dapat dipertanggung jawabkan. Media masa tidak sekedar hiburan, dalam (Blog, 2020) peran media massa terdiri dari: fungsi informasi, fungsi hiburan, fungsi persuasi, fungsi korelasi, fungsi pendidikan, fungsi pengawasan, fungsi interpretasi.

Dengan menjalin kerjasama antar Brimob POLRI – Media massa, diharapkan setiap berita yang diturunkan oleh media massa ditujukan untuk mendidik masyarakat menahan diri dan menghindari konflik.

Saran penulis untuk bekerjasama dengan media massa dalam meredam konflik di Jakarta, karena peran strategis media massa yang tercantum pada Ayat 3, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yang menyebutkan pentingnya melibatkan

media massa sebagai bagian dalam upaya membangun 'sistem peringatan dini' pencegahan konflik sosial. Menjadikan media pers sebagai mitra untuk mengedukasi masyarakat terhadap dampak buruk konflik. Diharapkan, surat kabar memberikan informasi seimbang kepada masyarakat sehingga tidak terjadi kesalahan persepsi yang berpotensi menjadikan POLRI sebagai 'musuh' masyarakat.

Pers juga bertanggung jawab untuk menyebarluaskan kebijakan kepolisian yang pro rakyat dan pro keadilan.

Saran untuk bekerjasama dengan media pers ini didasarkan pada teori Frank Jefkin yang menjelaskan bahwa kemitraan POLRI dan media akan memberikan manfaat jika yang diuntungkan tidak hanya satu pihak. Untuk itu beberapa prinsip perlu diterapkan yakni: *By serving the media, by establishing a reputation for realibility, by supplying good copy, by cooperation in providing material, by providing verification facilities, by building personal relationship with the media* (Jefkins, 2007)

b. Menampilkan sosok POLRI yang ramah

Umpan balik ke dua dalam FGD tersebut, pentingnya POLRI mengedepankan sikap penuh keramahan dalam berinteraksi dengan masyarakat Indonesia yang majemuk. Sebelum menjabat presiden, Joko Widodo dikenal dengan pendekatan kerakyatan untuk menyelesaikan perbedaan pandangan yang berpotensi menimbulkan konflik. POLRI bisa mengambil contoh Jokowi saat menjabat Walikota Solo dengan menyelesaikan masalah pemindahan pedagang kaki Lima (PKL) di kota Solo, tanpa gejolak sama-sekali. Mengutip <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia>, pendekatan Joko Widodo cenderung kerakyatan." Gerakannya itu sangat tampak kerakyatan, dan semua media, termasuk yang di Jakarta, mengetahui bagaimana dia kemudian terekspose sebagai orang yang memindahkan PKL," Ujar wartawan senior Sola Post Group, Rahmat Wibisono. POLRI dapat menerapkan strategi komunikasi Joko Widodo dalam melakukan komunikasi efektif untuk meminimalisir konflik. (Nur, 2011) mengungkapkan bagaimana Walikota Solo ini menerapkan teori empati, homofil, dan komunikasi convergence menjadi sebuah instrumen komunikasi yang efektif.

c. Membangun kemitraan dengan akademisi kampus

Akademisi kampus baik dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dapat menjadi mitra untuk membantu meminimalisir konflik. Kemitraan ini dapat dilakukan oleh Brimob POLRI dengan menjadikan insan akademisi membantu menyebarluaskan kebijakan Brimob POLRI dalam penanggulangan konflik. Untuk tersedianya mitra akademisi, sebagai *brand ambassador* beberapa tahap yang penting untuk dilakukan, sebagai berikut: *Pertama*, instansi Brimob POLRI mengirimkan undangan ke beberapa perguruan tinggi di Jakarta. Tujuan undangan tersebut meminta agar perguruan tinggi mengirimkan dua atau tiga orang untuk mengikuti workshop pelatihan menulis populer, dan output workshop yakni tersedianya penulis dari kalangan akademisi untuk menjadi penulis di bidang penanggulangan konflik. *Kedua*, Setelah terkumpul beberapa perwakilan dari perguruan tinggi di sekitar Jakarta, Brimob POLRI selanjutnya mengadakan workshop penulisan populer selama 2 atau 3 hari. *Ketiga*, agar terjadi *engagement*, Brimob POLRI membentuk suatu forum, misalnya WHATSAPP GROUP (WAG) agar para penulis dapat berkomunikasi, dalam konteks ini, Brimob POLRI bertindak sebagai admin untuk memberikan semangat dan pujian setiap kali ada artikel yang terbit dari anggota penulis yang intinya untuk menjembatani Brimob POLRI dengan masyarakat. Keberadaan kelompok penulis, untuk membantu mengedukasi masyarakat, menyebarkan kebijakan POLRI dalam meminimalisir potensi konflik. Pendekatan dengan memanfaatkan minat dan bakat akademisi dalam menulis dilakukan juga oleh Bank Indonesia (BI). Ketika terjadi potensi krisis ekonomi, penulis yang sudah terlatih membantu BI, menenangkan masyarakat dengan mensosialisasikan kebijakan yang akan dan sudah ditempuh oleh BI. Model pendekatan ini, diharapkan membuat masyarakat menjadi tenang dan tidak terjebak oleh berita hoaks. Dapat dikatakan, POLRI memerlukan *brand ambassador* sebagai instrument membantu pelaksanaan tugas dan fungsi POLRI.

KESIMPULAN

Korp Brimob POLRI sebagai pengemban tugas keamanan memainkan peran penting untuk mencegah dan menyelesaikan konflik yang terjadi di semua wilayah Indonesia. Potensi konflik dalam wilayah Indonesia cukup besar dikarenakan masyarakat Indonesia yang sangat heterogen. Pelaksanaan tugas Korps Brimob POLRI harus tetap dalam koridor HAM, kepatutan, dan hukum positif Indonesia. Keberhasilan pelaksanaan tugas Korps Brimob POLRI sangat tergantung dari partisipasi masyarakat, salah satunya para akademisi. Penyelesaian konflik dengan baik dan tidak mengundang resistensi dalam masyarakat dilakukan dengan bekerjasama dengan pers, agar pers memberitakan secara seimbang sehingga masyarakat percaya dengan niat baik POLRI. Mengedepankan tindak dan perilaku humanis, serta membentuk *ambassador* dari akademisi untuk melakukan edukasi dan mensosialisasikan kebijakan Korps Brimob POLRI kepada masyarakat sehingga miskomunikasi dan resistensi masyarakat dapat dihindari.

DAFTAR PUSTAKA

- Erma, N. H. (2021). Dampak Media Sosial Terhadap Konflik di Masyarakat. *EDUSOSHUM Journal of Islamic Education and Social Humanities*, 12-20.
- Harahap. (2018). Konflik Etnis Agama dan Agama di Indonesia. *JISA*, 1-19.
- Jefkins, F. (2007). *Public Relation*.
- Kaka, D. D. (2021, Oktober 29). *OSF PREPRINTS*. Retrieved from <https://osf.io/3qmca>
- Nur, T. F. (2011). Komunikasi Politik dalam Relokasi Pkl (Studi tentang Komunikasi Politik Wali Kota Ir. H. Joko Widodo dalam Penanganan Relokasi PKL Monumen Perjuangan 45 Banjarsari di Surakarta Tahun 2005).
- Oktorino, N. (2013). *Konflik Bersejarah Ensiklopedi Pendudukan Jepang di Indonesia*. Jakarta: PT Elek Media Komputindo.
- Rahdan, M. (2021). Perlawanan Rakyat Moronene Taubonto Terhadap Implrialisme Belanda: 1911-1941. *Journal Idea of History*, 137-152.
- Siregar, N. S. (2008). Evaluasi Sepuluh Tahun Reformasi POLRI. *Jurnal Penelitian Politik*.
- Sudarmanto, E. (2021). *Manajemen Konflik*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Suparmin. (2014). Reorientasi Peran POLRI Dalam Penanganan Konflik Sosial Dari Perseptif Penegakan Hukum. *ejournal.undip.ac.id*, 224-231.
- Syahid, G. (2018). Penanganan Konflik Agama Dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) serta Melalui Pendidikan Multikultural. *Jurnal Politik*, 1-19.

Umar, M. (2013, Desember 6). *Musniumar*. Retrieved from Musniumar:
<https://pt.slideshare.net/musniumar/konflik-sosial-di-dki-jakarta-permasalahan-dan-solusinya>

Blog, A. (2020, Agustus 25). *Tempo Institute*. Retrieved from Kiat:
<https://blog.tempoinstitute.com/berita/fungsi-media-massa/>